

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tonggak penting pembiayaan pendidikan di Indonesia. Pada amandemen keempat UUD 1945 pasal 31 ayat 4 disebutkan bahwa “negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang –kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Implementasi undang-undang dasar tersebut baru dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2009 setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemerintah wajib mematuhi UUD 1945 pasal 31 ayat tersebut. Keputusan MK tersebut merupakan hasil uji materi yang diajukan oleh Mohammad Surya dan orang tua murid terhadap APBN tahun 2008 yang hanya menganggarkan 15,6 % APBN untuk pendidikan.

Keputusan MK berdampak terhadap meningkatnya anggaran pendidikan di Indonesia pada tahun anggaran 2009. Pada tahun 2009, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 207.413.531.763.000,00 yang merupakan perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara sebesar Rp 1.037.067.338.120.000,00. (Depkeu, 2008) Tahun sebelumnya, APBN 2008, anggaran pendidikan sekitar Rp 48 triliun atau 12,3 persen dari APBN (Antara, 2007), sedangkan tahun 2007 sebesar 11,8 persen. (Suara Karya, 2007)

Perkembangan anggaran pendidikan di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL 1.1
PERKEMBANGAN ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM APBN

TAHUN	Total Anggaran Pend	BOS	BOS/Siswa/Thn
2007	43.498.000.000.000,- (11,8%)	9.841.117.952.000,-	254.000,-(SD)
			354.000,- (SMP)
2008	154.200.000.000.000,- (15,6%)	11.200.000.000.000,-	254.000,-(SD)
			354.000,-(SMP)
2009	207.413.531.763.000,- (20%)	16.000.000.000.000,-	397.000,-(SD kab)
			400.000,- (SD kota)
			570.000,- (SMP kab)
			575.000,- (SMPkota)
2010	221.400.000.000,- (20%)	16.600.000.000.000,-	397.000,-(SD kab)
			400.000,- (SD kota)
			570.000,- (SMP kab)
			575.000,- (SMPkota)

Sumber:

<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0701/13/nas04.html>
http://www.republika.co.id/koran/35/23463/Anggaran_Pendidikan_dalam_Ancaman_Korupsi
<http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=565>
<http://pkln.diknas.go.id/program2008/news.php?id=2>
<http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id/situs/index.php?mod=bos&read=4>

Pembiayaan pendidikan tidak hanya bersumber dari pemerintah, tetapi dapat diperoleh dari beragam sumber. Dalam PP Nomor 48 Tentang Pendanaan Pendidikan disebutkan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Istilah masyarakat dalam peraturan tersebut mencerminkan orang tua dan pihak lain yang peduli atas pendidikan. Pada

beberapa daerah yang menjadi kawasan industri, pengusaha merupakan sumber dana pendidikan pendukung, disamping dari pemerintah dan orang tua.

Keterlibatan pengusaha dalam pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 74 menyebutkan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Salah satu tanggung jawab sosial tersebut termanifestasi dalam pengembangan pendidikan disekitar wilayah perusahaan.

Keterlibatan perusahaan dalam pengembangan masyarakat, termasuk pendidikan, merupakan fenomena yang terjadi di beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Kalsel dikenal sebagai penghasil batu bara terbesar kedua setelah Kalimantan Timur. Di Kalsel, terdapat 378 perusahaan pemegang Kuasa Pertambangan (KP) yang diterbitkan oleh Bupati dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) 22 perusahaan (BKPMK Kalsel, 2012). Batu bara tersebut yang telah banyak mencetak orang-orang kaya baru di provinsi selatan *Borneo* tersebut. Dalam term “pengusaha batu bara” yang dipahami masyarakat berarti orang kaya, memiliki mobil berpuluh-puluh serta mewah, punya istri muda, dan segala simbol kemewahan.

Provinsi Kalimantan Selatan berdiri sejak tanggal 14 Agustus 1950 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950. Provinsi ini terletak di sebelah selatan pulau Kalimantan dengan batas-batas: sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat Makasar, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan di sebelah utara dengan Provinsi Kalimantan

Timur. Provinsi Kalimantan Selatan secara geografis terletak di antara 114 19" 33" BT - 116 33' 28 BT dan 1 21' 49" LS 1 10" 14" LS, dengan luas wilayah 37.377,53 km² atau hanya 6,98 persen dari luas pulau Kalimantan.

Kalimantan Selatan terletak di sebelah selatan pulau Kalimantan dengan luas wilayah 37.530,52 km² atau 3.753.052 ha. Sampai dengan tahun 2004 membawahi kabupaten/kota sebanyak 11 kabupaten/kota dan pada tahun 2005 menjadi 13 kabupaten/kota sebagai akibat dari adanya pemekaran wilayah kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Kotabaru dengan Kabupaten Tanah Bumbu. Jumlah penduduk Kalimantan Selatan dan sebarannya di setiap kabupaten dapat dilihat dari tabel berikut

TABEL 1.2
JUMLAH PENDUDUK KALIMANTAN SELATAN

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Jumlah Penduduk/ <i>Number of Population</i>		
	2006	2007	2008
Tanah Laut	255 188	265 629	270 091
Kotabaru	261 104	272 000	276 574
B a n j a r	459 748	480 010	489 056
Barito Kuala	258 682	269 448	272 332
T a p i n	149 332	152 077	153 066
Hulu Sungai Selatan	203 635	207 402	208 571
Hulu Sungai Tengah	236 021	242 189	244 192
Hulu Sungai Utara	209 107	214 191	216 181
Tabalong	185 889	191 000	193 082
Tanah Bumbu	210 287	221 304	226 208
Balangan	100 466	101 860	102 296
<i>Kota/ Municipality</i>			
Banjarmasin	589 115	615 570	627 245
Banjarbaru	152 839	164 000	167 737
Kalimantan Selatan	3 271 413	3 396 680	3 446 631

Sumber : BPS Kalsel (2009)

Sebagai penghasil batu bara, royalti yang diterima Provinsi Kalsel pada tahun 2008 hanya sekitar Rp. 85 Milyar. Royalti batu bara tersebut adalah 13,5% dari hasil tambang. Namun, dari 13,3% tersebut dibagi lagi 4,5% untuk daerah tempat tambang beroperasi (60% dari 3% tersebut untuk kabupaten dan 40% untuk pemerintah provinsi) dan sisanya untuk pemerintah pusat. (Frasetiandy, 2009, 11,07 : 28)

Produksi batu bara terbesar dihasilkan oleh PT. Adaro Indonesia. Total produksi pada tahun 2008 mencapai 38 juta ton, meningkat menjadi 40,6 juta ton pada 2009 dan pada tahun 2010 produksi batu bara Adaro mencapai 42,2 juta ton. Produksi tersebut jauh lebih besar daripada perusahaan yang juga pemegang PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara), PT. Arutmin, yang hanya berkisar 10 juta ton di tahun 2008. PT. Adaro Indonesia (selanjutnya disebut Adaro) melakukan eksplorasi sejak tahun 1982 di wilayah Kabupaten Tabalong dan mendapat konsesi tambang sampai tahun 2022. Wilayah konsesi tambang tersebut berada di dua kabupaten: Tabalong dan Balangan. Areal tambang terletak di daerah Tutupan, Paringin, Balangan, merupakan tambang *single pit* (hanya satu lokasi) terbesar di Indonesia.

Kandungan batu bara pada wilayah Tabalong dan Balangan yang akan dieksploitasi PT. Adaro Indonesia tergambar pada tabel berikut

TABEL 1.3
CADANGAN DAN SUMBER DAYA BATU BARA (JUTA TON)

	Tutupan	Paringin	Wara	Total
Reserves	659	-	328	987
Resources	1453	264	1086	2803

Sumber : PT. Adaro Indonesia

Keterangan

Reserves : Bagian dari batu bara yang telah di ketahui dimensi, sebaran kuantitas, dan kualitasnya, yang pada saat pengkajian kelayakan dinyatakan layak tambang.

Resources : Bagian dari endapan batu bara yang diharapkan dapat dimanfaatkan.

Sumber : Badan Standardisasi Nasional, SNI Klasifikasi Sumberdaya dan Cadangan Batubara

PT. Adaro Indonesia tidak hanya diberikan konsesi tambang tetapi juga bertanggung jawab atas pengembangan masyarakat di sekitarnya. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 74 menyebutkan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab tersebut dikenal dengan *corporate social responsibility (CSR)*.

Corporate social responsibility (CSR) adalah sebuah hubungan antara sebuah korporasi dengan stakeholdernya, juga masyarakat secara umum. (Aras & Crowther, 2009 : 23). Lebih jauh, Blowfield and Frynas (2005) menjelaskan bahwa CSR dapat dikenali dengan:

(a) that companies have a responsibility for their impact on society and the natural environment, sometimes beyond that of legal compliance and the liability of individuals; (b) that companies have a responsibility for the behaviour of others with whom they do business (e.g., within supply chains); and (c) that business needs to manage its relationship with wider society, whether for reasons of commercial viability or to add value to society. (Frynas, 2009 : 6)

Penjelasan Frynas tersebut menunjukkan CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan atas dampak usaha mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. CSR juga mencerminkan sebuah tanggung jawab perusahaan kepada pihak rekan bisnis mereka. Di lain sisi, CSR dapat pula dimaknai sebagai sebuah kebutuhan perusahaan untuk membangun hubungan dengan masyarakat yang lebih luas, untuk komersial atau untuk menambah nilai bagi masyarakat. Pendapat lain menyebut bahwa CSR merupakan bentuk dari etika dan moral perusahaan. (Frynas, 2005 : 5)

Corporate Social Responsibility (CSR) meliputi banyak aspek kehidupan masyarakat. Menurut Soelistijo (2007), ruang lingkup CSR meliputi *community service* (pelayanan kepentingan umum, termasuk pendidikan), *community empowerment*/pemberdayaan masyarakat (memberikan akses yang lebih luas untuk menunjang kemandirian masyarakat), dan *community relation*/hubungan masyarakat (pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada pihak terkait).

Konteksnya dengan CSR tersebut, Priyadi, General Manager Operation, PT. Adaro Indonesia, Dahai, Balangan, menyebutkan bahwa Adaro pada tahun 2008 menyisihkan 37 miliar rupiah untuk *Community Development* sekitar wilayah tambang. (Pemprov Kalsel : 2009). Dana CSR tersebut ditingkatkan pada tahun 2009 menjadi 51 milyar rupiah. (www.adaro.com/csr/49) Kabupaten yang mendapat bantuan dana CSR tersebut adalah Balangan, Tabalong, dan Hulu Sungai Utara di Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Barito Selatan. Sebagai daerah yang terkena dampak

langsung tambang, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong merupakan kabupaten yang mendapat prioritas dibandingkan kabupaten lain. Jumlah desa yang menjadi terdampak pada dua kabupaten ini relatif paling banyak daripada kabupaten lain. Dua kabupaten ini masing-masing mendapat dana CSR sebesar sekitar 15 milyar rupiah pada tahun 2010.

Menurut informasi masyarakat, *corporate social responsibility (CSR)*, yang dulu lebih populer disebut CD (*community development*) kepada pemerintah kabupaten di sekitar tambang sebesar 4 milyar rupiah. Khusus untuk bidang pendidikan, pada tahun 2009 PT. Adaro Indonesia memberikan dana 2,5 Milyar. Dana itu khusus digunakan untuk bimbingan belajar bekerja sama dengan sebuah lembaga bimbingan belajar, Primagama. Fenomena yang terlihat adalah dana CSR pendidikan tersebut belum berpengaruh secara nyata terhadap kualitas proses pendidikan. Padahal, seperti disebut diatas bahwa pembiayaan pendidikan punya pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pendidikan.

Selain untuk bimbingan belajar, CSR juga dialokasikan untuk beasiswa. Pada tahun 2007, pemberian beasiswa pada 190 sekolah dan 17 Perguruan Tinggi dengan total siswa 1.057 orang dengan total dana Rp. 480.000.000,- . Pada 2008 lalu, jumlah tersebut bertambah menjadi 248 sekolah dan 17 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan PTS dengan penerima beasiswa berjumlah 1.822 siswa dengan total dana beasiswa mencapai Rp. 800.000.000,-. Pada tahun 2010, nilai tersebut bahkan meningkat menjadi 1,2 miliar rupiah.

Secara kuantitas, pemberian beasiswa memang menunjukkan peningkatan yang signifikan tetapi program beasiswa tidak menyentuh secara adil pada kepada

masyarakat sekitar tambang. Menurut seorang penduduk Kabupaten Tabalong, proses seleksi penerima beasiswa tidak dilakukan secara benar, lebih banyak mengutamakan kepentingan pejabat dan keluarganya. Sebuah madrasah tsanawiyah juga hanya menerima alokasi beasiswa untuk 5 orang siswanya pada tahun 2009. Bahkan, sebuah MIN di Kabupaten Balangan hanya pernah menerima beasiswa hanya pada tahun 2006/2007.

Pada observasi awal penelitian ini terlihat bahwa dana bantuan dari perusahaan tidak dapat memberikan dampak bagi daya saing dan kualitas sekolah dan madrasah. Dengan kata lain, sekolah/madrasah di wilayah tambang tidak lebih baik dalam proses belajar mengajar daripada sekolah/madrasah lain di daerah non tambang. Pada SDN Dahai Paringin misalnya, sumber dana sekolah ternyata total bergantung pada dana dari pemerintah yaitu Bantuan Operasional Sekolah dan gaji pegawai. Sumber utama dana adalah dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 397.000,- persiswa pertahun dan belanja pegawai. Total penerimaan pada tahun 2010 adalah Rp. 326.673. 200- Sedangkan pengeluaran total adalah Rp. 326.673. 200--

Dengan demikian unit cost per siswa pada SDN Dahai adalah Rp. 326.673. 200,- dibagi 134 orang yaitu Rp. 2.437.680, pertahun. Angka tersebut cukup besar, tetapi itu termasuk gaji pegawai/guru yang mendominasi pengeluaran. Jika gaji tidak termasuk dalam perhitungan karena diasumsikan tidak untuk operasional pembelajaran unit cost per siswa per tahun atau biaya operasi non personalia per siswa pertahun adalah Rp. 397.000,- yang sepenuhnya bersumber

dari dana BOS. Sedangkan untuk distribusi dan alokasi pengeluaran tidak jauh berbeda dengan sekolah lain yang juga bersumber dari dana BOS.

Demikian juga pada tingkat SMP dan SMA. Sumber biaya dan pengeluaran tidak jauh berbeda. Pada SMPN 3 Paringin, yang merupakan sekolah yang berada di Ring I, sumber dana hanya dari BOS yaitu Rp. 570.000,-/siswa per tahun dan gaji guru PNS. Pada tingkat SMA, biaya operasional diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan sebagai bagian dari sekolah gratis sampai tingkat SMA/MA. SMAN 1 Paringin misalnya, mendapat alokasi Bantuan Operasioanal Manajemen Mutu Rp. 143.910.000,-. Dengan demikian, *unit cost* pada sekolah tersebut adalah Rp. 241.055,-

Biaya operasi nonpersonalia pada SDN Dahai tersebut jika dibandingkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 1.4
UNIT COST SEKOLAH BALANGAN DAN STANDAR NASIONAL

No	Sekolah/Madrasah	Biaya Operasi Nonpersonalia Sekolah	Standar Biaya Operasi Nonpersonalia	Indeks Kabupaten
1	SDN Dahai	370.000,-/siswa	Rp. 580.000	1,028
2	SMPN 3 Paringin	570.000,-/siswa	Rp. 710.000	1,028
3	SMA 1 Paringin	241.055/siswa	Rp. 960.000,-	1,028

Dari tabel tersebut, tampak bahwa CSR tidak berdampak pada meningkatnya biaya operasional sekolah. Di Kabupaten Balangan, Program CSR dilaksanakan dan langsung diterima sekolah berupa bantuan tas untuk siswa SD,

pembuatan lapangan sekolah, dan bantuan fisik lain. Demikian juga pada Kabupaten Balangan. Pada tahun 2010, dana CSR yang diterima SDN Dahai, menurut kepala sekolah, berbentuk tas untuk seluruh siswa dan alat tulis, serta sebuah komputer untuk operasional kantor. Dari informasi pihak Dinas Diknas, harga tas ransel tersebut sekitar Rp. 100.000,- perbuah sehingga total yang dana yang dikeluarkan untuk 134 orang adalah Rp. 13.400.000,- . Tas yang diberikan kepada siswa itu dominan berwarna orange disertai variasi warna merah pada beberapa bagian.

Pada sisi lain, proses pembelajaran tidak menunjukkan kualitas proses belajar mengajar yang lebih baik dari sekolah dasar lain. Proses pembelajaran masih menggunakan kapur tulis. Di dinding kelas tidak tampak hiasan-hiasan yang menonjol atau karya siswa. Dinding kelas tampak sudah lama tidak cat ulang sehingga terlihat kotor pada bagian bawahnya. Jendela kaca juga tidak memakai kain gordien atau tirai dan lantai masih berupa semen tanpa dilapisi keramik. Di bagian belakang ruang kelas, digunakan untuk menumpuk meja dan kursi yang tidak terpakai. Sementara pada depan kelas disediakan tempat air untuk mencuci tangan.

Pada tahun 2009/2010, prestasi sekolah pada Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) masih kurang memuaskan. Pada tiga mata ujian UASBN rata-rata jumlah nilai siswa adalah 17,07, rata-rata per mata ujian hanya 5,9. Secara prestasi non akademik, sekolah ini juga tidak melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler.

Gambaran sekolah tersebut menjadi tanda tanya besar jika melihat jumlah dana CSR pendidikan Adaro yang diklaim telah disalurkan. Sekolah hanya mendapat tas untuk siswa dan satu unit komputer. Dana CSR pendidikan bermilyar-milyar pada tingkat kabupaten tidak berdampak pada sumber pembiayaan pada sekolah. Jika merujuk pada pernyataan salah satu pernyataan staf CSR PT. Adaro Indonesia bahwa yang terkena dampak langsung menjadi prioritas CSR, semestinya sekolah ini mendapat perhatian dan menjadi prioritas CSR perusahaan. Pada level mana mekanisme dan proses penyaluran hingga alokasi dana ditetapkan menjadi pertanyaan yang menarik dicari jawabannya.

Informasi tersebut, paling tidak, menunjukkan bahwa program CSR sangat sedikit perhatiannya kepada sekolah tingkat dasar. Hal itu sejalan dengan laporan *Asian Development Bank* (1998) yang menyimpulkan bahwa di Indonesia, anggaran untuk sekolah dasar sangat sedikit. Padahal, investasi pada pendidikan dasar akan memberikan *return* terbesar daripada level sekolah di atasnya. (Bray and Thomas, 1998 : 110)

Kasus SDN Dahai tersebut mencerminkan belum tepatnya distribusi dan alokasi dana CSR. Hal itu juga menjadi cerminan dari pengabaian prinsip *equity* dan *equality* dalam pendidikan dan dalam pengelolaan CSR. Aras dan Crowther (2009) menjelaskan bahwa *equity* (keadilan) menjamin semua orang dalam sebuah komunitas merasa berada dalam komunitas tersebut. Sedangkan *equality* lebih mencerminkan kesamaan dalam hal kualitas dan kuantitas yang diterima. Dalam konteks CSR PT. Adaro Indonesia, semua siswa yang tinggal di lokasi terkena dampak langsung tambang berhak atas pendidikan (*equity*) dan mereka

berhak mendapat atas yang berkualitas dan mendapat dana CSR yang proporsional (*equality*).

Fenomena tersebut merupakan anomali dari teori-teori dalam pembiayaan pendidikan. Penelitian-penelitian yang menjadi mainstream tentang hubungan berbagai input sekolah dan prestasi siswa menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran biaya berhubungan signifikan dengan meningkatnya prestasi. (Greenwald, R., Hedges, L., & Laine, R, 1996). Wenglinsky (1997) menegaskan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara uang dan prestasi. Misalnya, setiap USD 1 per siswa yang digunakan untuk pembelajaran berhubungan dengan meningkatnya 1 poin nilai mata pelajaran matematika. Penelitian Molly (2011 : 357) yang di lakukan di Vermont menyimpulkan bahwa peningkatan pengeluaran biaya berdampak pada hasil kelulusan tes matematika. Menurutnya, 10% peningkatan pengeluaran uang akan meningkatkan nilai kelulusan matematika sekitar 2 sampai 6 poin. Dia mengakui bahwa peningkatan hasil juga terjadi pada mata pelajaran lain tetapi peningkatan paling besar ditemukan pada pelajaran matematika.

Bagaimana pembiayaan pendidikan berpengaruh terhadap hasil pembelajaran juga sangat jelas disebutkan dalam riset Fattah (2006: 137) yang di lakukan di Bandung. Riset itu menyimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar. Lebih jauh, dia mengatakan bahwa komponen biaya yang berkorelasi signifikan dengan proses belajar mengajar (PBM) adalah (1) gaji dan kesejahteraan pegawai, (2) biaya pembinaan guru, (3) pengadaan bahan pelajaran

(4)pembinaan kesiswaan, dan (5)biaya pengelolaan sekolah. Menurut Fattah, komponen yang cenderung tidak memberikan kontribusi secara signifikan adalah (1)pengelolaan alat pelajaran (2)pengadaan sarana kelas (3)biaya perawatan ruang belajar, dan (4)biaya pengadaan sarana sekolah.

Selain itu, Elliott (Ross, et.all. 2007 : 481) juga menemukan bahwa lebih tinggi pengeluaran per-murid di sebuah distrik, lebih tinggi pula nilai tingkat efektivitas pengajaran dan lebih baik peralatan kelas, dan lebih tinggi efektivitas pengajaran serta peralatan kelas yang lebih baik, lebih tinggi prestasi di bidang matematika serta sains. Studi Elliot itu memberikan memberikan bukti untuk meyakinkan bahwa teori keefektifan pengajaran dari sumber pengeluaran: pengeluaran per siswa akan meningkatkan prestasi siswa jika biaya digunakan untuk membayar guru dan melatih guru yang berkualitas dalam metode pengajaran yang efektif.

Anomali yang terjadi pada sekolah di Kabupaten Balangan tersebut, memberikan dasar untuk menggali lebih jauh tentang biaya dan kualitas pendidikan. Pada konteks CSR ini, dana yang relatif banyak dalam ukuran daerah/kabupaten lain, belum dapat dikatakan punya pengaruh secara nyata terhadap kualitas proses dan peningkatan mutu pendidikan madrasah dan sekolah di wilayah sekitar tambang. Hubungannya dengan CSR pula, klaim atas “bantuan” untuk pendidikan menjadi sangat rumit dan kompleks yang terkait dengan kebijakan pemerintah kabupaten, perusahaan, dan lembaga swadaya masyarakat. Persoalan itu juga merupakan sesuatu yang menarik untuk dikaji lebih mendalam dalam perspektif efektivitas biaya dan optimalisasi dana CSR untuk pendidikan.

Peran CSR pada bidang pendidikan juga berhubungan dengan keadaan madrasah dan sekolah secara kuantitas. Jumlah sekolah dan madrasah yang berada di sekitar wilayah tambang terdekat: Kabupaten Balangan dan Tabalong, dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL 1. 5
JUMLAH SEKOLAH DAN MADRASAH
DI KABUPATEN BALANGAN DAN TABALONG

JENIS SEKOLAH	BALANGAN	TABALONG
MIN	7	11
MIS	20	24
SDN	160	232
SD swasta	-	3
MTsN	3	19
MTsS	9	12
SMPN	21	30
SMP swasta	1	8
MAN	2	4
MA swasta	4	5
SMAN	9	11
SMA swasta	-	2
JUMLAH	236	361

Sumber : BPS Balangan (2009), BPS Tabalong (2009),
Kemenag Balangan (2009), dan Kemenag Tabalong (2009)

Jumlah siswa pada madrasah/sekolah di dua kabupaten tersebut menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Hal itu dapat di lihat dari tabel berikut

TABEL 1. 6
PERKEMBANGAN JUMLAH SISWA

JENJANG	BALANGAN			TABALONG		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
MI	1987	1998	2145	2534	2589	2607
SD	18056	18126	18276	22412	23700	24834
MTs	3102	3128	3174	4346	4464	4488
SMP	5431	5472	5494	6301	6635	6671
MA	1023	1072	1125	1414	1388	1323
SMA	1808	1879	1921	2786	2789	2799
JUMLAH	31407	31675	32135	39793	41565	42722

Sumber : BPS Balangan dan Tabalong (2009), Kemenag Balangan (2009), dan Kemenag Tabalong (2009)

Pada tabel tersebut tampak bahwa jumlah total siswa madrasah dan sekolah di dua kabupaten adalah 74.857 orang. Mereka mempunyai hak yang tidak jauh berbeda terhadap dana dari program CSR PT. Adaro Indonesia. Dengan kata lain, dana pendidikan yang diberikan PT. Adaro Indonesia harus dinikmati secara adil dan proporsional oleh seluruh siswa di dua kabupaten tersebut. Akan tetapi, fakta empirik menunjukkan dana bantuan tersebut tidak dinikmati oleh seluruh siswa yang berada di dua kabupaten tersebut, terutama oleh siswa yang tinggal di desa terdampak.

Seorang kepala madrasah ibtidaiyah mengatakan bahwa bantuan dari PT Adaro Indonesia tidak ada diberikan kepada madrasah yang dipimpinnya. PT Adaro Indonesia hanya memberikan bantuan beasiswa kepada siswa mereka. Hal itu juga terjadi di sekolah lain. Bahkan, dia mengatakan, “Pemda *umpat bacari* (Pemda ikut mencari nafkah)” dari dana *community development*. Pernyataan tersebut tidak memiliki argumen yang jelas tetapi cukup memberikan gambaran bahwa CSR masih dijalankan tidak di atas prinsip pengelolaan CSR. Padahal literatur-literatur yang membicarakan tentang CSR menekankan bahwa program CSR dibangun atas prinsip *sustainability, accountability, dan transparency*. (Aras and David Crowther, 2009).

Persoalan lain yang sangat menarik dicermati, selain dana bantuan yang tidak langsung ke proses pendidikan, adalah ketidaksamaan perlakuan antara sekolah dengan madrasah. Padahal, masyarakat (baca: siswa) yang menempuh pendidikan di madrasah juga merasakan dampak negatif dari eksplorasi batu bara. Keberpihakan program CSR terhadap madrasah sangat kurang jika dibandingkan dengan alokasi yang didistribusikan kepada sekolah.

Pada penelitian ini, pengelolaan dana CSR pendidikan di sekitar wilayah tambang batu bara tersebut dicermati dari sudut pembiayaan pendidikan. Fakta empiris sementara yang bisa dilihat adalah bantuan dari CD PT Adaro Indonesia tidak menunjukkan dampak yang maksimal bagi kemajuan pendidikan di sekitar wilayah tambang, terutama terkait dengan proses belajar mengajar di madrasah dan sekolah. Tidak hanya persoalan akademik, kegiatan non akademik (ekstra kurikuler) juga tidak menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada daerah lain.

Jika mencermati rata-rata nilai Ujian Nasional tingkat SMP dan SMA, pada tahun dapat dilihat bahwa terjadi penurunan rata-rata nilai. Pada tabel berikut dapat dilihat prestasi UN Kabupaten Balangan dan Tabalong yang disusun berdasarkan peringkat Provinsi Kalimantan Selatan

TABEL 1.7

PERINGKAT HASIL UN BALANGAN DAN TABALONG SERTA
PERINGKAT (RANK) SE-KALIMANTAN SELATAN

NO	KABUPATEN	2009		2010	
		RATA2	RANK	RATA2	RANK
1	BALANGAN				
	SMP/MTs/SMPT	7,13	5	6,89	13
	SMA/MA	7,32	1	6,62	13
2	TABALONG				
	SMP/MTs/SMPT	7,11	6	7,16	10
	MA/SMA	6,94	9	6,98	11

Sumber : Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemendiknas (2010)

Hasil tersebut memberikan gambaran alokasi CSR untuk bimbingan belajar sebesar Rp. 3.000.000.000,- tidak berdampak dengan hasil UN. Kabupaten lain, yang tidak mendapat dana CSR, mencapai hasil yang lebih baik. Terlepas dari kritik terhadap pelaksanaan UN, data tersebut paling tidak dapat menjadi pijakan awal penelitian ini.

Uraian diatas menjadi titik berangkat untuk mempertanyakan tentang bagaimana pengelolaan dana *corporate social responsibilty* (CSR) pendidikan PT Adaro di dua kabupaten : Balangan dan Tabalong. Oleh karena itu, penelitian ini diberi topik “Pengelolaan Dana *Corporate Social Responsibilty* (CSR) Pendidikan Perusahaan Pertambangan Batu Bara (Studi tentang Pengelolaan Dana CSR Pendidikan untuk Sekolah dan Madrasah Sekitar Area Tambang PT. Adaro Indonesia di Kabupaten Balangan dan Tabalong Kalimantan Selatan).



B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Pada daerah tambang, khususnya di Kabupaten Balangan dan Tabalong Kalimantan Selatan, sumber biaya pendidikan tidak hanya dari pemerintah dan orang tua, biaya pendidikan juga bersumber dari *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan pertambangan, dalam hal ini PT. Adaro Indonesia. Akan tetapi, bantuan dana yang diberikan PT. Adaro Indonesia melalui program CSR pendidikan untuk masyarakat sekitar tambang tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap proses dan hasil pendidikan. Sekolah dan madrasah di sekitar area tambang, tidak menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan.

Hal itu menunjukkan bahwa dana program CSR pendidikan tidak memberikan dampak yang maksimal terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Hal itu menunjukkan bahwa titik dasar permasalahan adalah efektifitas pengelolaan pembiayaan pendidikan dalam *corporate social responsibility* (CSR). Oleh karena itulah, fokus masalah penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dana CSR pendidikan PT Adaro Indonesia pada madrasah dan sekolah sekitar wilayah tambang batu bara PT. Adaro Indonesia di Kabupaten Balangan dan Tabalong, Kalimantan Selatan.

Bertolak dari hal tersebut, pertanyaan yang dijawab dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana proses penyusunan dan penetapan perencanaan program CSR pendidikan PT. Adaro Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme dan proses penyaluran dana CSR pendidikan PT. Adaro Indonesia dari perencanaan sampai pertanggungjawaban?
3. Bagaimana distribusi dan alokasi dana CSR pendidikan PT. Adaro Indonesia yang digunakan oleh sekolah dan madrasah?
4. Bagaimana penggunaan dana CSR pendidikan dari PT. Adaro Indonesia?
5. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban sekolah dan madrasah dalam pemanfaatan dana CSR pendidikan dari PT. Adaro Indonesia?
6. Bagaimana pengawasan dilakukan agar pengelolaan dana CSR pendidikan dari PT. Adaro Indonesia dilaksanakan secara profesional?
7. Apa hasil dan dampak program CSR pendidikan PT. Adaro Indonesia terhadap proses pendidikan pada tingkat sekolah dasar (SDN/MIN), sekolah menengah pertama (SMPN/MTsN) dan tingkat atas (SMA/MAN) di Kabupaten Balangan dan Tabalong?
8. Bagaimana “Model Strategi Pengelolaan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pendidikan Berbasis Kebutuhan, Pemerataan, dan Keadilan” dikembangkan agar pengelolaan dana CSR pendidikan dilaksanakan secara efektif dan efisien?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengetahui tentang proses penyusunan dan penetapan perencanaan program CSR pendidikan PT. Adaro Indonesia
2. Menggali lebih mendalam tentang mekanisme serta proses penyaluran dana CSR pendidikan PT. Adaro Indonesia.
3. Mengetahui dengan komprehensif dan tepat tentang distribusi dan alokasi dana CSR pendidikan PT. Adaro Indonesia
4. Mengetahui tentang penggunaan dana CSR pendidikan dari PT. Adaro Indonesia.
5. Mengetahui tentang mekanisme pertanggungjawaban pihak madrasah dan sekolah penerima dana CSR PT. Adaro Indonesia.
6. Mengetahui tentang pengawasan terhadap pengelolaan dana CSR PT. Adaro Indonesia
7. Mengetahui tentang hasil dan dampak program CSR pendidikan terhadap proses dan hasil pendidikan pada madrasah dan sekolah sekitar tambang batu bara PT. Adaro Indonesia di Kabupaten Balangan dan Tabalong
8. Mengembangkan Model Strategi Pengelolaan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pendidikan Berbasis Kebutuhan, Pemerataan, dan Keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi:

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam membangun, mengembangkan, atau memodifikasi teori-teori administrasi pendidikan yang sudah mapan, terutama terkait dengan pembiayaan pendidikan. . Penelitian ini juga bermanfaat dalam melihat cakrawala yang lebih komprehensif tentang pembiayaan pendidikan. Lebih khusus, penelitian ini menambah khazanah kajian pembiayaan pendidikan yang bersumber dari program CSR perusahaan pertambangan, khususnya pertambangan batu bara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambil kebijakan untuk mengembangkan pendidikan, terutama terkait dengan pengelolaan dana CSR pendidikan dari perusahaan pertambangan. Penelitian ini juga menghasilkan model pembiayaan pendidikan yang bersumber dari *corporate social responsibility* yang memposisikan semua lembaga pendidikan sama dalam kerangka otonomi daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi awal studi lebih lanjut tentang pembiayaan pada sekolah dan madrasah di sekitar tambang yang lebih detil dan komprehensif.

E. Sistematika Penulisan Disertasi

Disertasi ini terdiri dari lima bab yaitu bab satu pendahuluan, bab dua landasan teoritis, bab tiga metode penelitian, bab empat hasil penelitian dan pembahasan, serta bab lima kesimpulan dan saran.

Pada bab satu pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan disertasi.

Bab dua berisi tentang kajian psutaka. Bab ini membahas tentang pembangunan dan pendidikan, hubungan biaya dan output pendidikan, pembiayaan pendidikan, *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan sebagai sumber pembiayaan pendidikan, model-model pembiayaan pendidikan, dan diakhiri dengan paradigma penelitian, serta kerangka pikir penelitian.

Selanjutnya bab tiga yang mengemukakan tentang metode penelitian yang berisi tentang desain penelitian, lokasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan dan sumber data, instrumen penelitian, pengolahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab empat menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian berisi proses penyusunan dan penetapan perencanaan program CSR pendidikan PT. Adaro Indonesia, mekanisme dan proses penyaluran dana CSR pendidikan PT. Adaro Indonesia, distribusi dan alokasi dana CSR pendidikan PT. Adaro Indonesia, penggunaan dana CSR pendidikan PT. Adaro Indonesia, pertanggungjawaban sekolah/madrasah penerima dana CSR pendidikan PT. Adaro Indonesia, pengawasan terhadap pengelolaan dana CSR pendidikan PT.

Adaro Indonesia, dan tentang hasil dan dampak program CSR pendidikan PT. Adaro Indonesia.

Pada bab yang sama juga dibahas tentang pembahasan yang berisi tentang proses penyusunan dan penetapan perencanaan program CSR pendidikan, mekanisme dan proses penyaluran dana CSR pendidikan, distribusi dan alokasi dana CSR pendidikan, penggunaan dana CSR pendidikan, pertanggungjawaban sekolah/madrasah penerima dana CSR pendidikan, pengawasan terhadap pengelolaan dana CSR pendidikan, serta pembahasan tentang hasil dan dampak program CSR pendidikan, dan terakhir rangkuman pembahasan.

Pada akhir bab empat dibahas tentang model hipotetik Strategi Pengelolaan CSR Pendidikan Berbasis kebutuhan, Pemerataan, dan Keadilan yang membahas tentang rasional, landasan filosofis, pengertian, tujuan, prinsip-prinsip, unsur-unsur, dan prosedur pelaksanaan model.

Bab terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi yang berisi kesimpulan dan rekomendasi kepada PT. Adaro Indonesia, pemerintah, sekolah/madrasah, dan masyarakat. Pada bagian akhir disertasi ini adalah rujukan dan lampiran-lampiran.